

ISBN 978-602-70262-1-6

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

PEMANTAPAN KURIKULUM FIS BERBASIS KKNI UNTUK PERSIAPAN GENERASI EMAS 2045



Editor
Prof. Dr. Ferdinand Kerebungu, M.S.
Dr. Sisca B. Kairupan, M.Si
Dr. Apeles Lexi-Lonto, M.Si
Theodorus Pangalila, S.Fik, M.Pd



KERJASAMA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIMA DENGAN
FORUM PIMPINAN FIS (PENDIDIKAN) SE-INDONESIA

2015

PROSIDING

**“PEMANTAPAN KURIKULUM FIS BERBASIS KKNI
UNTUK PERSIAPAN GENERASI EMAS 2045.”**

**KERJASAMA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIMA
DENGAN FORUM PIMPINAN FIS (PENDIDIKAN)
SE INDONESIA**



Editor:

Prof. Dr. Ferdinand Kerebungu, M.Si.

Dr. Sisca B. Kairupan, M.Si.

Dr. Apeles Lexi Lonto, M.Si.

Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

2015

“PEMANTAPAN KURIKULUM FIS BERBASIS KKNI UNTUK PERSIAPAN GENERASI EMAS 2045.”

© Penulis

Penyunting: Ferdinand Kerebungu

Reviewer:

Sisca B. Kairupan
Apeles Lexi Lonto
Theodorus Pangalila

Foto Sampul:
Theodorus Pangalila

Perancang Sampul:
Erick Lobja

Penata Letak:
Paulus Robert Tuerah

Diterbitkan atas kerjasama:

**Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado dan
Forum Pimpinan FIS (Pendidikan) Se Indonesia**

ISBN 978-602-70262-1-6

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. **Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta** untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. **Barangsiapa** dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. **Barangsiapa** dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

LULUSAN DALAM PEKERJAAN DALAM PERSPEKTIF KURIKULUM BERBASIS KKNi Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D	83
DESENTRALISASI PENDIDIKAN: POLITIK DAN KONSENSUS? Dra. Meiseke M. W. Lasut, M.Hum.	94
PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI DI LPTK SELURUH INDONESIA Nofrion & Yurni Suasti	101
PENINGKATAN KOMPETENSI DASAR-DASAR KOMUNIKASI CALON GURU MELALUI KONSEP TEACHER'S IMMEDIACY Puspita Sari Sukardani, S.T., M. Med.Kom. Putri Aisyiyah Rachma Dewi, S.Sos., M.Med.Kom	109
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PERKOTAAN PADA SEKTOR PENDIDIKAN PASKA TARIK-ULUR PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 Prof. Dr. Dasman Lanin, M Pd.....	116
PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRATIS: Kajian Historis terhadap Desentralisasi Pendidikan Di Amerika Serikat dan Implikasinya bagi Indonesia Dr. Ruth S. Umbase, M.Hum.	132
STUDI TENTANG PENGEMBANGAN TEKNIK PEMBELAJARAN INOVATIF MATA PELAJARAN SEJARAH PADA SMP / SMA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA Dr. Meike Imbar, M.Pd.	148
PENGEMBANGAN KURIKULUM PKn BERBASIS KKNi MELALUI OPTIMALISASI PENERAPAN VARIASI MENGAJAR Dr. Julien Piringan, M.Si	168
PERSEPSI DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 OLEH GURU MATA PELAJARAN GEOGRAFI SMA SE-KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 Apik Budi Santoso & Rahayu Budi Arthani	174
MEDIA SEJARAH BERBASIS KKNi SEBAGAI SARANA PEMAHAMAN BELAJAR SEJARAH BANGSA Septina Alrianingrum, SS, M.Pd	180
KKNi UPAYA MEMBANGUN PROFESIONALISME GURU MASA DEPAN Sri Mastuti P	193
PERAN STRATEGIS <i>HUMAN RESOURCES DEPARTMENT</i> DALAM PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI Dr. Arie Supriati, M.Si.	199
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA MATA PELAJARAN SOSIOLOGI DI SMA N 1 TONDANO Dr. Maryam Lamaridisi	203

PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI DI LPTK SELURUH INDONESIA

Nofrion
&
Yurni Suasti

Dosen Jurusan Geografi, FIS, UNP
Email : dion_geografi@yahoo.com

Abstrak

Pendidikan yang dikelola dengan baik akan melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan akan meningkatkan harkat dan martabat suatu bangsa. Negara yang maju saat ini, dulunya adalah negara-negara yang telah memberikan perhatian dan menjadikan pendidikan sebagai investasi bagi mereka. LPTK sebagai lembaga pencetak calon guru di Indonesia mengemban tugas berat namun mulia dalam melahirkan guru-guru profesional yang mampu menjadi agen pembelajaran. Salah satu upaya penting harus dilakukan oleh LPTK adalah menyusun dan mengembangkan kurikulum yang handal dan operasional berbasis KKNI dan mempertimbangkan kondisi-kondisi internal dan eksternal. Agar tercipta mutu lulusan LPTK yang merata, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan kajian bagi perancang dan pengembang kurikulum di program studi, yaitu: menetapkan rumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran atau learning outcomes yang terstandar nasional, menetapkan mata kuliah wajib program studi pendidikan, menetapkan bobot dan porsi masing-masing komponen kurikulum, menentukan kompetensi pencari program studi di LPTK masing-masing serta menjaga kualitas dosen sebagai pendidik profesional.

Kata Kunci: *Kurikulum LPTK, KKNI, Capaian Pembelajaran/LO, Guru Geografi Profesional*

PENGANTAR

Pendidikan yang dikelola dengan baik akan melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan SDM yang berkualitas akan menjadi penentu harkat dan martabat negara tersebut di mata negara lain. Sejarah telah membuktikan bahwa, negara-negara maju hari ini adalah negara-negara yang sejak lama telah memberikan perhatian serius dan konsisten terhadap sektor pendidikan. Negara tersebut telah mampu menyelenggarakan pendidikan yang betul-betul “mencerdaskan” dalam spektrum jamak. Seperti yang disampaikan oleh Pakar Filsafat Pendidikan dari Brazil, Paulo Freire “Pendidikan sesungguhnya adalah alat untuk mencerdaskan manusia”. Pendapat ini juga sejalan dengan konsep pendidikan pada zaman Yunani yang menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk pembentukan manusia. Menurut pandangan Piaget, pendidikan dilaksanakan untuk memperoleh dan meremajakan struktur pemikiran yang lebih umum yang dapat digunakan pada bermacam-macam situasi (Wibowo, 2002:i).

Satu diantara negara maju tersebut adalah Jepang. Negara yang dijuluki negara “matahari terbit” ini telah mengawali reformasi pendidikannya pada masa Meiji (1872 – 1899). Meiji sebagai pemimpin Jepang saat itu menyadari bahwa pola pendidikan tertutup dan feodal ala “*shogun*” yang ada selama ini menjadikan bangsa Jepang menjadi bangsa “seperti katak dalam tempurung” maka perlu dilakukan reformasi. Lalu, dikirimlah anak-anak Jepang belajar ke berbagai penjuru dunia dan diterjemahkan buku-buku asing ke dalam Bahasa Jepang agar anak-anak Jepang bisa memetik perkembangan Ilmu Pengetahuan tanpa terhalang oleh bahasa. Setidaknya ada tiga kali gelombang reformasi dalam dunia pendidikan Jepang, sampai dengan dicetuskannya reformasi pendidikan yang dikenal dengan “*Rainbow Plan*” dalam rangka menyongsong pendidikan abad 21. Kini, Jepang mampu berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju lainnya hampir pada semua aspek

lehi lapan. Anak-anak Jepang dalam sepuluh tahun terakhir selalu masuk "Top Ten" dunia dalam hal Literasi Membaca, Matematika, Sains/IPA versi *Survey Program for international Students Assessment/PISA (OECD)*. Prestasi yang sulit diraih oleh banyak negara termasuk Amerika Serikat sekalipun.

Satu hal yang perlu menjadi catatan penting dari keberhasilan Jepang dalam membangun pendidikannya adalah perhatian yang besar terhadap kualitas guru dan sekolah. Mulai dari sistem rekrutmen, pendidikan guru, pembinaan dan pengembangan profesionalitas guru yang tertata dan berkelanjutan, pemberian sertifikasi dan evaluasi yang berkala serta penghormatan terhadap profesi guru adalah hal-hal positif yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dengan serius.

Tulisan kali ini tidak akan memperbandingkan antara kualitas pendidikan Jepang dengan Indonesia, karena tanpa dibahaspun siapapun akan dengan mudah dapat membedakannya. Tulisan ini, mencoba merefleksi dan menawarkan beberapa ide positif dan seroga konstruktif untuk membangun sebuah kerangka kurikulum pada program studi pendidikan di LPTK dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/KKNI namun tetap beraroma khas pendidikan dan berciri sebagai program studi yang fokus pada pembentukan pendidik profesional.

KURIKULUM LPTK DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Banyak pakar yang telah mendefinisikan kurikulum sebagai pedoman dalam praktik pendidikan dan pembelajaran. Dalam pandangan klasik, kurikulum diartikan sebagai rencana pelajaran di suatu sekolah atau materi pelajaran yang harus dipelajari di suatu sekolah seperti pandangan Hilda Taba yang menyatakan bahwa kurikulum adalah "*a plan for learning*" dan Maurutz Johnson (1967) yang mendefinisikan kurikulum sebagai serentetan tujuan belajar yang direncanakan. Dalam pandangan modern, pengertian kurikulum lebih dianggap sebagai suatu pengalaman atau sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan George A. Beauchamp (1986) mengemukakan bahwa: "*A Curriculum is a written document which may contain many ingredients, but basically it is a plan for the education of pupils during their enrollment in given school*". Lalu pendapat Caswel dan Campbell (1935) yang mengatakan bahwa kurikulum *... to be composed of all the experiences children have under the guidance of teachers*. Dipertegas lagi oleh pemikiran Ronald C. Doll (1974) yang mengatakan bahwa: "*...the curriculum has changed from content of courses study and list of subject and courses to all experiences which are offered to learners under the auspices or direction of school*". Lalu, Crankilton (1984) menyatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah aktivitas belajar dan pengalaman yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dalam rumusan yang lebih panjang, Taylor dan Richard (1985) berpendapat bahwa kurikulum adalah isi pendidikan, daftar mata pelajaran/mata kuliah, pengalaman pendidikan, bidang studi dan aktivitas belajar yang direncanakan. Merujuk pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19 dijelaskan bahwa: Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dari berbagai pendapat pakar dan sumber di atas dapat ditarik beberapa hal pokok mengenai ruang lingkup kurikulum, diantaranya adalah tentang: 1) kurikulum memuat tujuan pembelajaran yang menjelaskan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah lulus dalam istilah lain disebut "*what man can become*" yang terlihat pada rumusan Standar Kompetensi Lulusan atau rumusan *Learning Outcomes/LO* sebuah program Studi, 2) kurikulum memuat materi yang apa saja yang harus dipelajari selama menempuh pendidikan/materi apa saja yang harus dipelajari (tergambar dari nama-nama mata kuliah), 3) kurikulum juga memuat kegiatan dan pengalaman belajar (*activity and learning experiences*), yang meliputi; model/pendekatan/strategi/metode/teknik/taktik pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa termasuk penggunaan media dan berbagai sumber belajar, 4) penilaian dan evaluasi, 5) kurikulum juga memuat berbagai aturan yang mendukung terselenggaranya pembelajaran dengan efektif dan efisien.

Berbicara tentang pendidikan tinggi, kurikulum yang dilaksanakan harus mampu mewujudkan tujuan seperti yang telah ditetapkan. John Henry Newman dalam bukunya *The Idea of a University* menyatakan bahwa sebuah perguruan tinggi seperti universitas merupakan pusat ilmu pengetahuan. Sebuah universitas harus mampu mengembangkan misi sebagai tempat untuk pengembangan pandangan, cara, kebiasaan berfikir dan kemampuan untuk melakukan interaksi sosial dalam masyarakat. Newman juga berpandangan bahwa universitas merupakan human institution yang menghasilkan individu yang memiliki pengetahuan luas, kemampuan berfikir kritis, bermoral dan memiliki kepekaan sosial (Wibowo dan Tjptono, 2002).

Pada pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pada LPTK, terdapat beberapa tonggak perkembangan kurikulum beserta aturan yang mendasarinya. Diantaranya:

1. Tahun 1970 – 1990 : Kurikulum dengan sistem *concurrent* atau terintegrasi yang memuat kompetensi akademik kependidikan, kompetensi bidang studi dan jati diri bangsa Indonesia. Pengelompokan mata kuliah adalah MKDU, MKDK, MKPBS dan MKPBM.
2. Tahun 1994 - 2000 : Kurikulum di LPTK dikenal dengan kurikulum dengan pendekatan topik inti (content based curriculum) dengan kelompok mata kuliah MKU, MKDK, MKK I, MKK II ditambah lagi dengan Program Post Secondary Subject Matter (PSSM) dengan bobot 20 sks.
3. Tahun 2000 – 2005 : Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan kelompok mata kuliah MPK, MKK, MPB, MKB dan MBB sesuai dengan Kepmendiknas nomor 232/U/2000. Lalu, lahir Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang kompetensi utama dan pendukung serta kompetensi lainnya (kurikulum inti dan institusi) Kurikulum LPTK pada masa ini juga mengadopsi The Four Pillars of Education, UNESCO (1997) serta mengacu pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, PP Nomor 19 tahun 2005 tentang SNP dan UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menjelaskan Kompetensi Utama Guru.
4. Tahun 2009 -- 2012 ; Kurikulum pendidikan tinggi khususnya di LPTK mengacu kepada Permendiknas nomor 8 tahun 2009 tentang Program pendidikan Profesi Guru Pra-Praktik, UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNL.

Berdasarkan rentetan tonggak sejarah perkembangan kurikulum di LPTK serta aturannya di atas terlihat bahwa kurikulum di Indonesia berkembang cukup dinamis.

PENGEMBANGAN KURIKULUM LPTK SEBAGAI PENCETAK GURU PROFESIONAL

Menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan ini bisa tercapai melalui penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara sadar dan terencana serta adanya kurikulum yang handal.

Perkembangan terkini di Indonesia, pengembangan kurikulum pada sebuah program studi, khususnya di LPTK harus memperhatikan kondisi internal seperti Visi dan Misi, Tracer Study Alumni, Peraturan Institusi, Analisis SWOT dan Tingkat Kepuasan Mahasiswa. Disamping itu, juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi eksternal seperti tuntutan stakeholder, tantangan masa depan, perkembangan komposisi penduduk/demografi, perkembangan IPTEKS, Tracer Study Pengguna Alumni, *External Examiners* dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/KKNI.

LPTK memiliki tugas utama sebagai lembaga pencetak calon guru profesional. Profesi guru di Indonesia merupakan profesi mulia yang semakin diminati oleh masyarakat sejak lima tahun terakhir, secara khusus sejak reformasi guru dimulai dengan Deklarasi Guru sebagai profesi oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono tanggal 4 Desember 2004. Satu tahun kemudian, tepatnya tanggal 15 Desember 2005 diperhitkanlah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran (Depdikbud, 2011).

Minat dan Animo tamatan SLTA untuk melanjutkan pendidikan ke program studi pendidikan dalam lima tahun belakangan memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Sebagai contoh, data peminat dan jumlah mahasiswa yang diterima di program studi pendidikan Geografi, FIS, UNP tahun 2010 – 2014.

Tabel 1 : Rekapitulasi Daya Tampong dan Peminat Program Studi Pendidikan Geografi Tahun 2010 – 2014

NO	TAHUN	PEMINAT	DITERIMA	RASIO	KETERANGAN
1	2010	760	132	1:6	Data Peminat hanya jalur SBMPTN saja.
2	2011	1175	94	1:13	
3	2012	2408	81	1:30	Data peminat dari jalur SNMPTN, SBMPTN dan MANDIRI
4	2013	3525	95	1:37	
5	2014	2586	59	1:43	

Sumber : BAAK UNP, 2015

Tren data seperti ini diperkirakan terjadi juga pada hampir semua LPTK Negeri lainnya di Indonesia. Hal ini, menjadi salah satu potensi besar bagi LPTK karena dengan semakin banyak peminat dan semakin besar rasio maka diharapkan kualitas input juga semakin baik. Pertanyaannya adalah, kurikulum seperti apakah yang bisa dikatakan sebagai kurikulum ideal bagi LPTK sebagai pencetak guru profesional?. Sehingga *input* mahasiswa yang semakin baik tersebut juga akan mendapatkan proses yang baik dengan harapan *output*nya juga semakin berkualitas.

Terkait dengan pengembangan kurikulum Program Studi Pendidikan di LPTK, Sepe ti yang telah diuraikan sebelumnya, pengembangan kurikulum di program studi harus memperhatikan kondisi internal dan eksternal yang ada. Jumlah LPTK negeri di Indonesia adalah 12 buah dan tersebar di Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi. Walaupun LPTK tersebut berada pada wilayah yang berbeda disertai dengan kondisi sosial budaya yang khas pula, namun dalam penyusunan kurikulum minimal ada dua hal yang bisa dijadikan dasar untuk merumuskan kurikulum yang memiliki pokok-pokok garisan utama yang sama terutama dalam hal merumuskan profil lulusan dan LO. Dua hal tersebut adalah:

1. Lulusan program studi pendidikan geografi, sebagian besar akan bekerja sebagai guru geografi di SMA atau di SMP. Guru yang diharapkan adalah guru geografi yang profesional. Maka, rujukan guru profesional adalah rumusan dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru profesional adalah guru yang memiliki empat kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kepribadian.
2. Sebagai guru geografi, dalam menjalankan tugasnya mereka akan menggunakan kurikulum yang sama dimanapun mereka berada di seluruh nusantara. Apa yang diijarkan guru geografi pada kelas dan semester tertentu harus sama "*scope*" dan "*sequence*" nya baik di sekolah yang berada di Sabang ataupun Merauke. Baik di sekolah di Miangas ataupun Pulau Rote. Karena sudah ditetapkan dalam Standar Isi dan Struktur kurikulum sesuai kurikulum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya ini menjadi dasar bagi seluruh perancang dan pengembang kurikulum di seluruh program studi pendidikan Geografi untuk:

1. Menetapkan Profil Lulusan dan Rumusan Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*) Terstandar Nasional untuk Seluruh Program Studi Pendidikan Geografi.

Ada tiga profil lulusan sarjana pendidikan termasuk pendidikan geografi yaitu: 1) perdidik (utama), 2) peneliti pendidikan dan 3) peneliti bidang studi dan terapannya dalam pendidikan. Sedangkan capaian pembelajaran/*learning outcomes* sarjana pendidikan meliputi: 1) keterampilan kerja khusus, 2) penguasaan pengetahuan, serta 3) sikap.

Jika seluruh program studi pendidikan Geografi di Indonesia sudah merumuskan profil lulusan dan capaian pembelajaran/*Learning Outcomes* yang sama maka akan tercipta lulusan pendidikan geografi yang Terstandar secara Nasional. Sarjana Pendidikan Geografi lulusan UNIMED akan relatif sama kualitasnya dengan lulusan UNP, UNM ataupun LPTK lainnya.

Contoh rumusan capaian pembelajaran/*learning outcomes* SI Kependidikan adalah:

- a. Keterampilan Kerja Khusus, meliputi;
 - 1) Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler dengan pendekatan pembelajaran siswa aktif, dengan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar yang berbasis IPTEKS dan potensi lingkungan setempat sesuai dengan standar proses dan mutu.
 - 2) Mampu melakukan pendampingan siswa dalam lingkungan pembelajaran
 - 3) Mampu melakukan evaluasi pembelajaran dengan Penelitian Tindakan Kelas (*Action Research*)
 - 4) Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dalam penyelenggaraan kelas, sekolah dan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya dan mengevaluasi aktivitasnya secara komprehensif.
 - 5) Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan informasi dan data dalam penyelenggaraan kelas, sekolah dan lembaga yang menjadi tanggung jawabnya.
 - 6) Mampu melakukan kajian terhadap masalah mutu, relevansi dan akses di bidang pendidikan dan menyajikan pilihan terbaik dari solusi yang telah ada untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
 - 7) Mampu mengkaji dan mengembangkan berbagai metoda pembelajaran yang telah tersedia secara inovatif dan teruji.
- b. Penguasaan Pengetahuan, meliputi;
 - 1) Menguasai konsep teoritis pedagogi dan konsep pengetahuan dalam bidang studi yang sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - 2) Menguasai konsep, prinsip dan aplikasi berbagai metode pembelajaran khususnya yang berorientasi pada kecakapan hidup/life skills
 - 3) Menguasai prinsip dan teknik perencanaan dan evaluasi pembelajaran
 - 4) Menguasai pengetahuan factual tentang fungsi dan manfaat teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu pendidikan
- c. Sikap; Memiliki ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai dan potensi peserta didik.

Forum pimpinan FIS LPTK yang digelar setiap tahun ini bisa menjadi media diskusi yang tepat bagi seluruh program studi untuk menyatukan pandangan dalam merumuskan profil lulusan dan rumusan capaian pembelajaran yang terstandar Nasional untuk masing-masing program studi. Penulis optimis, jika hal ini bisa diwujudkan akan menjadi solusi bagi permasalahan ketimpangan kualitas guru geografi di seluruh Indonesia dan memudahkan bagi pemerintah untuk melakukan program pembinaan dan pemberdayaan guru lanjutan karena semua guru sudah memiliki dasar yang relatif merata.

2. Menetapkan Mata Kuliah Wajib Program Studi Pendidikan Geografi seluruh LPTK di Indonesia

Dalam kongres Ikatan Geograf Indonesia/IGI tahun 2014, sudah direkomendasikan sebagai mata kuliah wajib sebagai penciri program studi geografi baik kependidikan maupun non kependidikan yang ada di seluruh Indonesia. Diantaranya adalah geologi, geomorfologi,

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan kurikulum juga harus mempertimbangkan perkembangan sosial budaya dan globalisasi. Isu yang sedang mendominasi adalah akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA mulai tahun 2015. Dimana untuk negara-negara ASEAN, akan tercipta pola interaksi antar ruang yang "borderless" dalam banyak aspek kehidupan terutama ekonomi, sosial, budaya juga pendidikan. Tidak hanya itu, kurikulum juga dirancang sesuai dengan permintaan pasar dan peluang kerja dalam negeri atau wilayah kerja LPTK yang bersangkutan.

Untuk itu, disamping merumuskan profil lulusan dan capaian pembelajaran secara nasional juga perlu ditambahkan kompetensi khusus yang menjadi penciri program studi suatu LPTK. Contohnya, saat ini Program Studi Pendidikan Geografi sedang berupaya untuk merumuskan kompetensi khusus lulusan Sarjana Pendidikan SI yaitu mampu melakukan analisis data keruangan berbasis SIG. Hal ini dilakukan sekaitan dengan tersedianya Laboratorium SIG Jurusan Geografi, FIS, UNP yang lengkap dan berlisensi serta terintegrasi dengan Teknologi Penginderaan Jauh (memiliki pesawat tanpa awak/Aibotix). Untuk mendukung hal itu, mata kuliah SIG diberikan bobot 5 sks.

Disamping itu, dalam kurikulum pendidikan geografi juga diberikan mata kuliah bidang studi rumpun IPS yaitu Dasar-dasar Ekonomi, Dasar-dasar Ilmu Sejarah dan Dasar-dasar Sosiologi – Antropologi. Hal ini dilakukan karena, lulusan pendidikan Geografi, FIS, UNP banyak juga yang bekerja sebagai guru di SMP atau sederajat. Ini merupakan bentuk pengakomodasian tuntutan peluang kerja dan belum adanya program studi IPS di Sumatera Barat. Demikian juga dengan LPTK lain di Indonesia. LPTK bisa menambahkan mata kuliah penciri program studi yang merupakan kompetensi tambahan/pendukung.

5. LPTK Perlu Memperhatikan Kualitas Dosen

Paulo Freire pernah berkata "pendidikan yang menindas juga akan melahirkan generasi penindas". Artinya, pendidik pada sebuah program studi pendidikan harus memiliki kompetensi pedagogik yang memadai. Dosen sebagai pendidik harus mampu menjabarkan paradigma pembelajaran dari mengajar menjadi belajar sampai pada paradigma membelajarkan. Dosen harus bisa menjadi Model bagi mahasiswa calon guru. Bukan hanya segi keilmuannya, tapi juga penguasaan pedagogik termasuk kompetensi sosial dan kepribadian. Tentunya ini berlaku bagi semua dosen yang mengajar di program studi pendidikan baik yang berlatar belakang kependidikan maupun tidak, Dosen sebagai seorang pendidik harus memiliki pemahaman dan kemampuan dalam memainkan peran sebagai agen pembelajaran dan menerapkan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yaitu ; *Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani serta Waspada Purba Wasesa*. Kuncinya, mau merefleksi dan mengevaluasi diri serta mau belajar dan meningkatkan kompetensi diri secara berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa ini bukanlah pekerjaan mudah bagi LPTK Negeri. Tapi penulis yakin bahwa jika LPTK Negeri mampu merancang Kurikulum yang ideal dan Handal maka itu berarti telah ikut menyelamatkan anak-anak bangsa Indonesia. Karena kurikulum dengan unsur-unsurnya adalah komponen penting dalam sistem pendidikan disamping kualitas guru. Tidak hanya itu, LPTK Negeri akan menjadi contoh bagi LPTK lainnya di Indonesia yang jumlahnya mencapai 388 buah (1 FKIP UT, 26 FKIP Negeri dan 342 LPTK swasta) dengan jumlah mahasiswa 1,2 juta orang (Kemendikbud, 2013).

SIMPULAN

1. Negara-negara maju saat ini adalah negara-negara yang sudah sejak lama memberikan perhatian besar dan konsisten terhadap penyelenggaraan pendidikan dan kualitas guru.
2. Sejak pendeklarasian Guru sebagai Profesi oleh Mantan Presiden Republik Indonesia, SBY tahun 2004 dan keluarnya UU Guru dan Dosen yang secara tegas meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, Program studi pendidikan sangat dinikmati oleh lulusan SMA.

3. LPTK sebagai lembaga yang diberikan amanah oleh pemerintah untuk mencetak guru harus mampu merancang dan mengembangkan kurikulum berdasarkan kondisi-kondisi internal dan eksternal dan memiliki kesamaan pandangan dalam berbagai hal terutama perumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran atau *learning outcomes*, menetapkan mata kuliah wajib program studi pendidikan, menetapkan bobot dan porsi masing-masing komponen kurikulum, menentukan kompetensi penciiri program studi di LPTK masing-masing serta menjaga kualitas dosen sebagai pendidik.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, Moh. 2014. Hand Out Mata Kuliah Analisis dan Pengembangan Kurikulum PPs UNP. Padang
- Ferlandes, Reno. 2015. *Pendidikan Hadap Masalah*. Artikel Harian Online Haluan. Padang. Diakses 20 September 2015
- Kerendikbud. 2013. *Menyiapkan Guru Masa Depan*. Ebook. Diakses 12 September 2015.
- Mandukh, Budiman. 2014. *Mencermati Sistem Pendidikan di Jepang*. Artikel Ilmiah. [Http://jnimus.ac.id/diakses](http://jnimus.ac.id/diakses) 10 September 2015
- No'ron. 2015. *Sistem Pendidikan di Negara Jepang*. Makalah. Tidak Diterbitkan. Program Studi Ilmu Pendidikan (S3) PPs UNP. Padang
- Syah Nur, Agustiar. 2001. *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung: Lubuk Agung
- Schubert, W. S. 1986. *Curriculum: Perspective, Paradigms and Possibility*. New York: Macmillan Publishing Company.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

SUMBER LAIN :

- Bahan Sosialisasi KKNI, Bapak Sajidan, FKIP UNS Surakarta 2014
- Bahan Sosialisasi KKNI, Ibu Nurul Widiastuti, Ph.D 2014
- Bahan Sosialisasi KKNI, Bapak Wagiran, UNY 2014
- Bahan Sosialisasi KKNI, Tim DIKTI, 2011
- Bahan Sosialisasi KKNI, Ibu Liliana Sugiharto, 2014
- Bahan Sosialisasi KKNI, Ibu Megawati, Ph. D, 2011
- Booklet STOLS For ITTEP 2014.
- Materi Short Course STOLS for ITTEP 2014, Mrs. Naomi Takashawa
- Materi Short Course STOLS for ITTEP 2014, Mr. Prof. Masaaki Sato
- Materi Short Course STOLS for ITTEP 2014, Mr. Prof. Manabu Sato
- Materi Short Course STOLS for ITTEP 2014, Mr. Prof. Ranjani Shekar